



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Direktorat Usaha Penangkapan Ikan
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

2026

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ungkapan terima kasih atas adanya kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, maka Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja (Manual IKU) Level II Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2026 yang telah disesuaikan dengan pemutakhiran Rencana Kerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan ini dapat diselesaikan. Pedoman pengukuran ini disusun untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan terukurnya *output* serta *outcome* yang dihasilkan sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Semoga pedoman ini dapat memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran, pengelolaan dan penyajian data kinerja sehingga meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan dan anggaran pembangunan perikanan tangkap.

Jakarta, Februari 2026

Direktur Usaha Penangkapan Ikan



UKON AHMAD FURKON

1



SASARAN KEGIATAN :

**PENGELOLAAN PERIZINAN SESUAI
KETENTUAN**

NAMA IKU 1

: **ALOKASI PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENGANGKUTAN IKAN (ALOKASI KAPAL)**

DEFINISI

Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan dalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dengan melalui proses verifikasi, klarifikasi, penelaahan dan evaluasi

CARA PENGUKURAN

Jumlah alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan dalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dalam satu periode tahun berjalan

Satuan Pengukuran	:	Alokasi Kapal
Sumber Data	:	Direktorat Usaha Penangkapan Ikan
Validasi	:	Output Kendali Rendah
Perhitungan Data	:	Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Penanggung Jawab IKU Atasan	:	Timja Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan
Periode Pelaporan	:	Triwulan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	13.000

NAMA IKU 2

**DOKUMEN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN
PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENGANGKUTAN IKAN YANG DITERBITKAN
(DOKUMEN)**

DEFINISI

Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan (SIPI), perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan tangkap (SIKPI) yang diterbitkan dengan melalui proses verifikasi, klarifikasi, penelaahan dan evaluasi

CARA PENGUKURAN

$$=\sum SIPI+ \sum SIKPI$$

Keterangan :

SIPI : Surat Izin Penangkapan Ikan
SIKPI : Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan

Satuan Pengukuran	:	Dokumen
Sumber Data	:	Direktorat Usaha Penangkapan Ikan
Validasi	:	Output Kendali Tinggi
Perhitungan Data	:	Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Penanggung Jawab IKU Atasan	:	Timja Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan
Periode Pelaporan	:	Triwulan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	10.000

NAMA IKU 3

: PERSENTASE REKOMENDASI HASIL ANALISIS PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN YANG DITINDAKLANJUTI (PERSEN)

DEFINISI

Rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti

CARA PENGUKURAN

$$=(\sum RTL)/(\sum RAP)) \times 100\%$$

Keterangan:

1. **RTL** : jumlah rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti
2. **RAP** : jumlah rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan

Satuan Pengukuran	:	Persen
Sumber Data	:	Direktorat Usaha Penangkapan Ikan
Validasi	:	Output Kendali Tinggi
Perhitungan Data	:	Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Penanggung Jawab IKU Atasan	:	Timja Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
Periode Pelaporan	:	Semesteran
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	92

NAMA IKU 4

: **TINGKAT KEPATUHAN PELAKU USAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN (nilai)**

DEFINISI

Tingkat kepatuhan seluruh pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan berdasarkan hasil analisis profil risiko. Tingkat profil risiko menunjukkan kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan, semakin tinggi profil risiko maka tingkat kepatuhan semakin rendah. Analisis profil risiko diterapkan kepada setiap pelaku usaha melalui penilaian terhadap:

1. Kepemilikan asset wajib bayar;
2. Kepatuhan dalam penyampaian laporan produksi; dan
3. Ketepatan waktu pembayaran PNBP.

Melalui analisis dan perhitungan terhadap kondisi dan pembobotan akan ditentukan profil risiko sebagai berikut :

$$\sum \text{Skor Profil Risiko} = \sum (\text{Bobot Indikator } x_i \times \sum_{i=1}^N \text{Skor Indikator } x_i)$$

Keterangan :

Total skor ≤ 1	Risiko sangat rendah
Total skor $> 1 - 2$	Risiko rendah
Total skor $> 2 - 3$	Risiko sedang
Total skor $> 3 - 4$	Risiko tinggi
Total skor $> 4 - 5$	Risiko sangat tinggi

Kriteria dan Bobot Penilaian Profil Risiko Pelaku Usaha

No.	Indikator	Kriteria Penilaian	Skor Penilaian					Bobot Penilaian
			1	2	3	4	5	
1	Kepemilikan aset wajib bayar berdasarkan akumulasi ukuran kapal penangkap ikan yang memiliki perizinan berusaha aktif dalam satuan Gross Tonnage (GT)	Kepemilikan aset dalam satuan GT dikelompokkan berdasarkan akumulasi GT kapal aktif yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam satu SIUP	<30 GT	30-200 GT	200-500 GT	500-1000 GT	1000-20.000 GT	0.2
2	Penyampaian laporan penghitungan mandiri yang lengkap dan akurat	Perbandingan volume produksi dengan data acuan produksi berdasarkan profil perikanan yang sejenis	Volume produksi lebih besar sama dengan volume acuan produksi	Volume produksi 75-100% Dari volume acuan produksi	Volume produksi 50-75% dari volume acuan produksi	Volume produksi 25-50% dari volume acuan produksi	Volume produksi kurang dari 25% volume acuan produksi	0.5
3	Pembayaran kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak pungutan hasil perikanan secara tepat waktu	Lama waktu pembayaran kewajiban pungutan hasil perikanan yang dihitung sejak tanggal STBLK terbit	<1 hari	1-7hari	7-14 hari	14-30 hari	>30 hari	0.3

Satuan Pengukuran	:	Nilai
Sumber Data	:	Direktorat Usaha Penangkapan Ikan
Validasi	:	Output Kendali Rendah
Perhitungan Data	:	Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Penanggung Jawab IKU Atasan	:	Timja Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	3,3

NAMA IKU 5

: PERSENTASE PROVINSI YANG DIFASILITASI PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN KEWENANGAN GUBERNUR (PERSEN)

DEFINISI

Provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan kewenangan Gubernur melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q, Ditjen Perikanan Tangkap

Formula Perhitungan :
$$\frac{\sum \square PFP}{\sum \square PRI} \times 100$$

▲ Keterangan : PFP : provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan kewenangan Gubernur
PRI : provinsi di Indonesia (37)

Satuan Pengukuran	:	Persen
Sumber Data	:	Direktorat Usaha Penangkapan Ikan
Validasi	:	Output Kendali Tinggi
Perhitungan Data	:	Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Penanggung Jawab IKU Atasan	:	Timja Harmonisasi dan Pembinaan Perizinan Penangkapan Ikan Kewenangan Pusat dan Daerah serta Fasilitasi Perizinan Penangkapan Ikan untuk Nelayan Kecil
Periode Pelaporan	:	Triwulan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	92

NAMA IKU 6

: PERSENTASE KETERSEDIAAN SISTEM LAYANAN USAHA PENANGKAPAN (PERSEN)

DEFINISI

Penilaian ketersediaan system layanan usaha penangkapan berdasarkan log aplikasi

Formula Perhitungan :
$$= (\sum HTL) / 365 \times 100 \%$$

Keterangan : HTL : Hari ketersediaan Layanan (dihitung dari hari dengan waktu ketersediaan waktu layanan 24 jam penuh dengan melihat log rekaman aktivitas aplikasi

Satuan Pengukuran	:	Persen
Sumber Data	:	Direktorat Usaha Penangkapan Ikan
Validasi	:	Output Kendali Tinggi
Perhitungan Data	:	Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Penanggung Jawab IKU Atasan	:	Timja Harmonisasi dan Pembinaan Perizinan Penangkapan Ikan Kewenangan Pusat dan Daerah serta Fasilitas Perizinan Penangkapan Ikan untuk Nelayan Kecil
Periode Pelaporan	:	Triwulan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	97

NAMA IKU 7

: PERSENTASE TINDAK LANJUT LAYANAN KONSULTASI USAHA PENANGKAPAN IKAN (PERSEN)

DEFINISI

Penyelenggaraan konsultasi dan tindak lanjut layanan konsultasi terkait aplikasi perizinan melalui saluran yang ditentukan

Formula Perhitungan :

$$\frac{\sum \square PS}{\sum PM} \times 100 \%$$

Keterangan :

PS = Pengaduan terkait perizinan yang masuk yang ditindak lanjuti dan diselesaikan

PM = Pengaduan yang masuk |

Satuan Pengukuran	:	Persen
Sumber Data	:	Direktorat Usaha Penangkapan Ikan
Validasi	:	Output Kendali Rendah
Perhitungan Data	:	Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Penanggung Jawab IKU Atasan	:	Timja Harmonisasi dan Pembinaan Perizinan Penangkapan Ikan Kewenangan Pusat dan Daerah serta Fasilitasi Perizinan Penangkapan Ikan untuk Nelayan Kecil
Periode Pelaporan	:	Triwulan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	100

2



SASARAN KEGIATAN :

**TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN
MANAJERIAL YANG BAIK LINGKUP
DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN
IKAN**

NAMA IKU 8

INDEKS PROFESIOANALITAS ASN DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN (INDEKS)

DEFINISI

- Indeks profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan ikan

CARA PENGUKURAN

Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan

Formula Perhitungan

$$: IP\ ASN\ DJPT = \frac{IP\ 1 + IP\ 2 + \dots + IP\ n}{n}$$

Keterangan

: IP ASN DJPT= Nilai Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

IP 1, IP 2,IP 3 = Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Eselon II lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

n = Jumlah Eselon II lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJERIAL YANG BAIK LINGKUP DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN

Satuan Pengukuran	:	Indeks
Sumber Data	:	Ropege KKP
Validasi	:	Output Kendali Tinggi
Perhitungan Data	:	Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Penanggung Jawab IKU Atasan	:	Subag. Tata Usaha
Periode Pelaporan	:	Semesteran
Metode Cascading	:	Tidak Diturunkan
Target	:	84,5

NAMA IKU 9

PENILAIAN MANDIRI SAKIP DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN

DEFINISI

Indikator penilaian mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian).

CARA PENGUKURAN

Dihitung dari hasil penilaian terhadap kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan dengan menggunakan instrumen (lembar kerja evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun aspek penilaiannya, yaitu: 1. **Aspek kepatuhan, (Bobot 25%)** dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja 2. **Aspek kesesuaian (bobot 25%),** dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan 3. **Aspek ketercapaian (bobot 30%),** dinilai dari pencapaian kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku) dan 4. **Aspek Ketepatan (bobot 20%)**

Satuan Pengukuran	:	Nilai
Sumber Data	:	Direktorat Usaha Penangkapan Ikan
Validasi	:	Output Kendali Tinggi
Perhitungan Data	:	Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Penanggung Jawab IKU Atasan	:	Timja Dukman
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Tidak diturunkan
Target	:	88,2

NAMA IKU 10

: PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN
UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN
IKAN (PERSEN)

DEFINISI

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan.

CARA PENGUKURAN

$$RHP = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan

: RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan

$\sum N_t$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh DJPT

$\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada DJPT

TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJERIAL YANG BAIK LINGKUP DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN

Satuan Pengukuran	:	Persen
Sumber Data	:	Itjen KKP
Validasi	:	Output Kendali Tinggi
Perhitungan Data	:	Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Penanggung Jawab IKU Atasan	:	Subag Tata Usaha
Periode Pelaporan	:	Triwulan
Metode Cascading	:	Tidak Diturunkan
Target	:	86

NAMA IKU 11

: **NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT LINGKUP DIREKTORAT USAHA
PENANGKAPAN IKAN (INDEKS)**

DEFINISI

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

Formula Perhitungan : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi).

Keterangan : Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP

TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJERIAL YANG BAIK LINGKUP DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN

Satuan Pengukuran	:	Indeks
Sumber Data	:	Direktorat Usaha Penangkapan Ikan
Validasi	:	Output Kendali Tinggi
Perhitungan Data	:	Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Penanggung Jawab IKU Atasan	:	Subag Tata Usaha
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	88,8

NAMA IKU 12

: PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN (PERSEN)

DEFINISI

Persentase serapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan pada periode berjalan

CARA PENGUKURAN

$$PSE = \frac{\sum N_r}{\sum N_p} \times 100\%$$

Keterangan

: PSE = Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Kenelayanan

$\sum N_r$ = Jumlah Realisasi Anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan pada satu satuan waktu

$\sum N_p$ = Jumlah Pagu Anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2026

TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJERIAL YANG BAIK LINGKUP DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN

Satuan Pengukuran	:	Persen
Sumber Data	:	Direktorat Usaha Penangkapan Ikan
Validasi	:	Output Kendali Tinggi
Perhitungan Data	:	Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Penanggung Jawab IKU Atasan	:	Timja Dukman
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Tidak Diturunkan
Target	:	98,6



Terima Kasih.